

Judul : Jangan korbankan keadilan demi kecepatan, Komisi VII minta stop wacana war tiket haji
Tanggal : Minggu, 12 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jangan Korbankan Keadilan Demi Kecepatan

Komisi VIII Minta Stop Wacana War Tiket Haji

Komisi VIII DPR menyoroti gagasan war ticket dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk mengurangi antrean masa tunggu jemaah haji. Gagasan tersebut jangan sampai mengorbankan keadilan demi kecepatan.

ANGGOTA Komisi VIII DPR Atalia Praratya menilai, gagasan tersebut sebagai bentuk kegelisahan Pemerintah terhadap masa tunggu haji yang mencapai 26 tahun. Tapi, gagasan ini dinilai sangat prematur karena mengabaikan aspek keadilan sosial dan berpotensi menghancurkan tata kelola keuangan haji yang sudah berjalan baik.

"Kita semua sepakat, menunggu hampir tiga dekade untuk berangkat haji adalah waktu yang terlalu lama," ujar Atalia dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, salah satu gagasan yang muncul untuk mengatasi persoalan masa tunggu haji adalah menghapus sistem masa tunggu atau waiting list. Selanjutnya, sistem beralih menggunakan mekanisme war tiket atau pendaftaran langsung.

"Pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yang mau berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket," kata Gus Irfan sebagaimana unggahan pada

media sosial Instagram Kemenhaj, Kamis (9/4/2026).

Namun, lanjut Atalia, solusi tidak boleh lahir dari ketergesaan yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Mengembalikan sistem haji ke mekanisme war tiket atau balapan cepat seperti sebelum tahun 2017 adalah sebuah kemunduran besar bagi reformasi tata kelola haji di Indonesia.

"Wacana ini juga secara terang-terangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menganut prinsip *first come first serve* berdasarkan nomor porsi (NOPORS) pendaftaran," jelas politikus Golkar ini.

Menurut Atalia, Ibadah haji adalah panggilan jiwa, bukan ajang balapan. Jika sistem war tiket diterapkan, maka yang akan menang adalah mereka yang memiliki gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan.

"Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka



Atalia Praratya

akan tersisihkan," tegas Atalia.

Atalia menjelaskan, sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah (Rp 25 juta) dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat dari pengelolaan inilah yang selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya haji, sehingga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bisa ditekan.

Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung, dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. "Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?" tanya dia.

Atalia menyarankan sebaiknya Kemenhaj serius menerapkan

single database nasional yang sinkron antara Kemenhaj dengan BPKH. Dengan data yang akurat, Pemerintah bisa memetakan berapa jemaah yang benar-benar eligible atau memenuhi syarat istithaah setiap tahun.

"Fokuslah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur di sana, jangan malah mengubah sistem di hulu yang justru berantakan," sarannya.

Selain itu, ia mengusulkan perlunya ada skema afirmasi dalam antrean. Mereka yang telah mendaftar lama dan kini berusia lanjut atau di atas 65 tahun harus mendapatkan prioritas keberangkatan tanpa harus ikut perang tiket. "Ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif di mana negara hadir melindungi yang lemah," kata dia.

Atalia mengajak semua pihak, termasuk Komisi VIII DPR dan Kemenhaj, agar tidak terburu-buru mengubur sistem antrean yang sudah berjalan. Karena itu, wacana war tiket harus segera dihentikan jika kajian akademisnya belum tuntas dan belum melibatkan partisipasi publik secara luas.

Dia menambahkan, hal ini bukan soal inovasi atau kuno, tapi soal melindungi 5,5 juta calon jemaah haji yang sedang dalam antrean panjang. "Jangan karena kita ingin terlihat progresif, malah menelantarkan mereka," kata Atalia.

Senada, Ketua Komisi VIII

DPR Marwan Dasopang menilai, wacana penerapan skema war tiket haji berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, mekanisme keberangkatan haji diatur melalui pendaftaran dan antrean, bukan perebutan tiket seperti yang diwacanakan.

"Perlu ada perubahan regulasi terlebih dahulu jika Pemerintah tetap ingin menerapkan skema tersebut," saran Marwan di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, ia mempertanyakan dasar hukum jika skema war tiket diterapkan, karena pembagian kuota haji sudah diatur secara rinci dalam undang-undang. "Kalau dibagi ini untuk berburu tiket, pasalnya di mana?" tanya dia.

Marwan juga mengingatkan aspek historis dan sosiologis dalam merumuskan kebijakan haji. Apalagi antrean panjang haji telah terjadi sejak 2008 akibat tingginya minat masyarakat. "Sistem antrean dibuat untuk menjaga keadilan bagi seluruh calon jemaah," tandas politikus PKB ini.

Selain itu, skema war tiket berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena hanya akan menguntungkan pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih. "Kalau diberi ruang bebas, maka orang-orang tidak akan berhaji, maka akan ada kecemburuan," tandasnya. ■ TR